

Siaran Pers

CISDI Laporkan Kesiapan Puskesmas sebagai Pusat Vaksinasi melalui Hasil Survei

Jakarta, 3 Mei 2021 - Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) meluncurkan hasil Survei Kesiapan Puskesmas untuk Vaksinasi secara daring pada Selasa, 3 Mei 2021. Temuan survei ini menyatakan puskesmas di Indonesia yang berpartisipasi di dalam survei siap mengambil peran sebagai sentra vaksinasi Covid-19. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan, termasuk di antaranya komitmen pemerintah mengoptimalkan regulasi dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya di wilayah desa dan kabupaten yang jauh dari pusat kota.

Dalam peluncuran hasil survei ini, beberapa pakar seperti Diah Saminarsih (Senior Advisor on Gender and Youth, WHO), Dr. Ines Atmosukarto (CEO Lipotek, pengembang *drug delivery system*), dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH (Epidemiolog, Griffith University), Hasna, S.K.M (Kepala Puskesmas Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat), dan Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Pit. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI) turut menanggapi hasil survei serta memberikan pandangan perihal kapasitas dan optimalisasi puskesmas dalam skema vaksinasi di Indonesia. Laporan hasil Survei Kesiapan Vaksinasi Puskesmas yang ditulis oleh CISDI dapat diunduh melalui tautan [s.id/CISDI_VaksinPuskesmas](https://www.cisdi.id/CISDI_VaksinPuskesmas).

Sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020, kasus Covid-19 di Indonesia hingga hari ini mengalami dinamika fluktuatif. Berdasarkan data yang dikeluarkan Satgas COVID-19 per 3 Mei 2021, jumlah kasus baru berada di rerata 4.000 per hari dan secara akumulatif menambah total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1,6 juta kasus. Meskipun telah berlangsung setahun, *positivity rate* Indonesia belum mencapai angka yang disyaratkan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization / WHO*) yaitu di bawah 5%. Kondisi ini merefleksikan lemahnya upaya deteksi dan lacak kasus di Indonesia. Hal ini sekaligus mengindikasikan peran pemerintah yang lebih berfokus melawan wabah melalui program vaksinasi sejak awal 2021.

Financial Times (21/04) melaporkan secara global, vaksin terbukti efektif menekan penularan COVID-19 di lima benua. Melalui skema vaksinasi, target kelompok sasaran membentuk sistem imun yang lebih kuat. Kondisi ini meningkatkan perlindungan khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, orang dengan komorbiditas serta tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan rentan.

Di Indonesia sendiri, cakupan vaksinasi untuk (1) SDM kesehatan yang mendapatkan dosis pertama mencapai 101% dan dosis kedua 92%; (2) petugas publik yang mendapatkan dosis pertama mencapai 49% dan dosis kedua 28%; (3) lansia yang mendapatkan dosis pertama

mencapai 12% dan dosis kedua mencapai 7% (Kementerian Kesehatan RI, 3 Mei 2021). Secara total, 4,6% populasi di Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 2,9% mendapatkan dosis kedua. Untuk mengakselerasi cakupan vaksin, fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas memiliki peranan penting. Namun, ada setidaknya 4 faktor yang perlu ditilik lebih lanjut untuk memastikan kesiapan puskesmas sebagai sentra vaksinasi yang tersebar di seluruh negeri.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) melakukan survei cepat yang diikuti oleh 184 orang yang berasal dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota di 30 provinsi. Berikut adalah beberapa temuan dari survei ini adalah sebagai berikut:

- **Kesiapan Sumber Daya Manusia**
 - 49% puskesmas memiliki tenaga vaksinator berjumlah di atas 6 orang;
 - 42,4% responden puskesmas dengan jumlah 4-6 orang;
 - 8,7% puskesmas hanya memiliki vaksinator 1-3 orang; dan
 - 47,3% responden mengaku bahwa hanya sebagian tenaga vaksinasi di puskesmas yang mendapatkan pelatihan;
 - Sementara 40,8% responden mengaku sudah seluruh tenaga vaksinasi di puskesmas mendapatkan pelatihan vaksinasi.

- **Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)**
 - Lebih dari 90% puskesmas responden merasa alat pelindung diri (APD) yang disediakan sebulan terakhir cukup untuk tenaga kesehatan; serta
 - Apron (8,7%) dilaporkan sebagai jenis APD yang paling banyak tidak tersedia di puskesmas asal responden, diikuti dengan masker N95, FFP2, dan KN95 (6,5%), dan kacamata *goggle* (4%).

- **Kesiapan Logistik Vaksinasi**
 - Survei menunjukkan 98% responden melaporkan memiliki genset yang masih berfungsi di puskesmas tempat mereka bekerja.
 - Mayoritas responden puskesmas (96,2%) memiliki kulkas untuk vaksin yang masih berfungsi dan 90,2% responden melaporkan kulkas tersebut sudah dilengkapi dengan alat pemantau suhu. Responden puskesmas yang menjawab ketidaktersediaan kulkas yang masih berfungsi semuanya berada di luar Pulau Jawa.
 - 97% puskesmas sudah memiliki *cold box* untuk vaksin, namun tidak semua *cold box* dilengkapi dengan *ice pack* namun 82,1% responden mengaku bahwa ketersediaan *ice pack* hanya cukup untuk beberapa *cold box* saja.
 - Hampir seluruh Puskesmas (99%) pada survei ini juga telah memiliki *vaccine carrier* (pembawa vaksin). Namun, masih ada 8.7% puskesmas yang belum memiliki *ice pack* yang cukup untuk seluruh *vaccine carrier*.

- **Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)**

- 94% puskesmas memiliki fasilitas dan obat-obatan penanganan KIPI. 83% responden melaporkan puskesmas memiliki mekanisme rujukan yang jelas apabila ada KIPI yang terjadi di puskesmas mereka
- 20,7% responden responden masih mengakui puskesmas tempat mereka bekerja tidak mempunyai tenaga yang terlatih dalam menangani KIPI.

Selain keempat faktor di atas, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan puskesmas sebagai pusat pelaksanaan vaksinasi di masyarakat seperti penanganan limbah medis, pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi terintegrasi PCare, hingga kemampuan pengelolaan layanan kesehatan esensial lainnya seperti layanan rawat jalan, layanan antenatal dan postnatal serta layanan imunisasi dasar dan lanjutan bagi anak.

Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, menyatakan peran puskesmas sebagai modal Indonesia dalam mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi perlu dibarengi dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan jumlah SDM kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan. “Dari segi SDM, 90% puskesmas sudah memiliki tenaga vaksinator berjumlah di atas 4 orang. Namun, hampir 90% puskesmas memberdayakan staf puskesmas tanpa ada tenaga vaksinator tambahan. Selain itu, lebih dari 90% puskesmas juga sudah siap menangani KIPI. Survei ini tidak bisa dianggap sebagai representasi dari seluruh puskesmas di Indonesia, namun dari survei ini kami semakin yakin bahwa puskesmas memiliki posisi strategis dalam skema vaksinasi khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota untuk menjangkau vaksinasi. Namun, pemerintah pusat maupun daerah perlu terus memberikan penguatan puskesmas melalui penambahan SDM kesehatan, ketersediaan APD, dan tes berkala serta dukungan logistik,” ujar Oliv.

Rekomendasi ini diamini oleh **Hasna, S.K.M, Kepala Puskesmas Bambalamotu**, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat ini, persentase kasus Covid-19 di Sulawesi Barat mencapai 2,2% dari total kasus nasional (Satgas COVID-19, 3 Mei 2021). Program vaksinasi sudah berjalan hingga tahap kedua yang menjangkau petugas pelayanan publik serta kelompok lansia. Namun kendala terbesar yang dihadapi oleh Puskesmas Bambalamotu adalah distribusi vaksin yang tidak mencukupi jumlah sasaran. “Saat ini, jumlah kelompok sasaran Puskesmas Bambalamotu sekitar 14.000 jiwa sementara ketersediaan vaksin baru mencapai angka 300. Padahal antusiasme masyarakat sejauh ini sangat positif dan bisa menerima pemberian vaksinasi.”

Tantangan seputar kebutuhan sarana dan prasarana vaksin COVID-19 bukan satu-satunya kendala utama di lapangan. **dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH, Epidemiolog, Griffith University** turut menekankan peran puskesmas dalam merespons keragu-raguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. “Indonesia beruntung memiliki layanan kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas. Keterlibatan komunitas seperti kader posyandu, kader jumantik dan lintas sektor dalam upaya kesehatan di puskesmas berkontribusi positif dalam mengisi kesenjangan atau kekosongan yang tidak mampu dijalankan oleh puskesmas. Dalam konteks Indonesia, satu puskesmas bisa mengampu 40.000 jiwa. Jika bicara target vaksinasi 1 juta, target ini akan realistis jika kita bisa melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Namun kita juga

perlu menyadari bahwa vaksin COVID-19 ini adalah hal baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ketidaktahuan ini memunculkan potensi penolakan atau keragu-raguan. Oleh karenanya, kita juga perlu melibatkan tokoh masyarakat termasuk tenaga kesehatan puskesmas seperti dokter, perawat dan bidan dalam menjalankan strategi komunikasi berbasis kearifan lokal agar penolakan vaksin dapat menurun. Dengan optimalisasi puskesmas dalam menjalankan komunikasi intens seputar manfaat klinis dan sosioekonomi dari vaksin COVID-19, fungsi monitoring yang tepat, hingga pemenuhan sisi logistik vaksin COVID-19, harapannya kita dapat meningkatkan proteksi dari angka kesakitan akibat varian baru COVID-19,” demikian ujar Dicky Budiman.

Selain keterlibatan tokoh masyarakat dan lintas sektor dalam memperkuat peran puskesmas merealisasikan target cakupan vaksinasi, **Dr. Ines Atmosukarto, CEO Lipotek sekaligus pengembang *drug delivery system***, juga memaparkan bentuk keterlibatan sektor lain seperti sektor swasta untuk dalam mengakselerasi distribusi vaksin dan meningkatkan edukasi publik. “Di Indonesia ada banyak sekali wacana seputar pelibatan sektor swasta, seperti yang sebelumnya disebut dengan program vaksin gotong royong. Di Indonesia, cara pengadaan vaksin yang melibatkan swasta adalah suatu eksperimen di Indonesia namun tidak dilakukan di negara lain. Di sisi lain, saya melihat ada banyak sekali bentuk keterlibatan sektor swasta di luar pengadaan vaksin. Sektor swasta bisa mengurangi beban pemerintah dalam bidang logistik, distribusi, dan penyimpanan vaksin. Sektor swasta juga bisa membantu meningkatkan animo masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin itu sendiri, hingga mendatangkan vaksinator ke tempat pelaksanaan usaha. Sektor swasta juga bisa meringankan biaya vaksinasi untuk pegawainya. Biaya vaksinasi individu bukan hanya biaya vaksin saja tapi juga ada biaya transportasi untuk menjangkau vaksinasi. Jika ada pegawai yang merasakan gejala-gejala KIPI bisa difasilitasi agar tidak dipotong cutinya,” ujar Ines Atmosukarto.

dr. Prima Yosephine BT Hutapea, M.K.M., Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI merespons positif hasil survei yang dipaparkan oleh CISDI. “Hasil survei kesiapan vaksinasi di puskesmas yang dilakukan CISDI ini menjadi masukan bagi pemerintah. Kami menargetkan puskesmas mampu memberikan vaksinasi kepada minimal 50 orang di tingkat desa dan 200 orang per hari di tingkat kota. Sejalan dengan visi ini, saya setuju dengan hasil survei CISDI yang menyatakan kebutuhan tenaga kesehatan tambahan di luar SDM kesehatan puskesmas. Untuk melengkapi pemenuhan sarana prasarana pendukung vaksin, Kementerian Kesehatan RI sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan untuk pembiayaan vaksinasi yang nantinya akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa 4% dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil bisa digunakan untuk mendukung kegiatan vaksinasi seperti pembelian alat pelindung diri, mendukung ketersediaan jaringan teknologi agar pelaporan vaksinasi dapat berjalan lancar, pengelolaan limbah medis hingga insentif bagi tenaga kesehatan di puskesmas.”

Diah Saminarsih, Senior Advisor on Gender and Youth WHO, menyatakan vaksinasi membawa harapan baru dalam penanganan Covid-19. Namun saat ini negara-negara di dunia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi keseimbangan antara *supply* dan *demand*

vaksin COVID-19. “Apa yang terjadi di tingkat puskesmas, komunitas dan nasional adalah refleksi dari apa yang terjadi di global. Saat ini suplai vaksin belum cukup padahal kebutuhannya sangat tinggi. Inilah situasi *unequitable vaccine* (ketidakmerataan vaksin). Sejak awal pandemi, WHO sudah mendorong penguatan layanan kesehatan primer sebagai jalan keluar dari pandemi. Berkaitan dengan program vaksinasi, kemampuan puskesmas dalam memetakan target sasaran khususnya kelompok rentan akan membantu mempercepat distribusi vaksin. Namun kami menyadari bahwa masih ada tantangan dari mulai tingkat layanan kesehatan primer hingga nasional sehingga WHO masih terus bekerja sama dengan negara anggota WHO untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan vaksinasi,” tutup Diah.

- SELESAI -

Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. Sejak 2020, CISDI mendirikan Unit Tanggap COVID-19 yang melakukan riset dan analisa kebijakan serta aktif mendorong kebijakan berbasis bukti di masa pandemi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Sdr. Amru Sebayang

Content & Media Officer

Email: communication@cisdi.org

www.cisdi.org